

RELECTIO

Journal of Critical Governance and Legal Reform

Vol. 1, No. 1, 2026, 35-47

ISSN: XXXX-XXXX (Print) | ISSN: XXXX-XXXX (Electronic)

Open Access: <https://journal.binaba.id/index.php/jhb/index>

Menjalar dalam Kerentanan: Kajian Batas Pengorganisasian Rimpang dalam Perlindungan Peserta Aksi pada Gerakan Mahasiswa di Yogyakarta

Tecto Raditya Gillardino Saka

Department of Politics and Government, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada

Email: tectoradityagillardinosa2006@ugm.ac.id

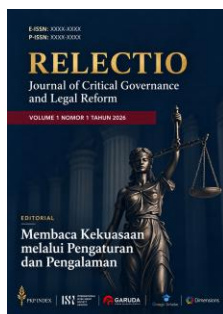
Abstrak

Artikel ini mengkaji batas perlindungan peserta aksi dalam pengorganisasian rimpang pada gerakan mahasiswa di Yogyakarta, dengan perhatian pada keterlibatan mahasiswa Universitas Gadjah Mada pada paruh pertama 2026. Fokus analisis mencakup cara inisiatif aksi bergerak antarkelompok, peran penghubung dalam koordinasi, pengelolaan komunikasi publik, serta tekanan yang dialami peserta. Penelitian menggunakan studi kasus kualitatif eksploratif. Bahan kajian terdiri atas wawancara dengan seorang pengorganisasi aksi, tiga ilustrasi digital, dan pemberitaan sebagai konteks peristiwa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inisiatif yang datang dari beberapa kelompok tetap memerlukan penghubung untuk menjaga komunikasi dan menyelaraskan pelaksanaan. Pengorganisasi juga mengatur penyampaian pesan melalui jeda sebelum merespons, penggunaan saluran alternatif, dan penyederhanaan bahasa politik. Pada saat yang sama, ilustrasi digital menunjukkan persaingan pembingkai yang menempatkan mahasiswa sebagai sasaran kritik, aparat sebagai penjaga ketertiban, dan gerakan sebagai pihak yang mengajukan tanggapan. Informan melaporkan gangguan terhadap akun serta menceritakan seorang peserta yang menarik diri setelah mengalami tekanan melalui keluarga. Pengalaman tersebut memperlihatkan bahwa kelancaran koordinasi dan komunikasi belum menjelaskan bagaimana peserta memperoleh dukungan ketika menghadapi tekanan. Artikel ini menunjukkan batas analitis pengorganisasian rimpang: konsep tersebut menjelaskan penyebaran inisiatif dan kerja penghubung, tetapi belum dengan sendirinya menerangkan perlindungan yang diterima individu. Kesimpulan dibatasi oleh penggunaan satu informan dan materi digital yang terbatas. Penelitian lebih lanjut perlu menelusuri pengalaman langsung peserta yang menghadapi tekanan serta bentuk dukungan yang diberikan organisasi.

Kata kunci: Gerakan mahasiswa; kerentanan; komunikasi digital; pengorganisasian rimpang; perlindungan peserta aksi

Abstract

This article examines the limits of protection for protest participants within rhizomatic organizing in a student movement in Yogyakarta, focusing on the involvement of Universitas Gadjah Mada students during the first half of 2026. It analyzes how protest initiatives move across groups, how intermediaries coordinate collective activity, how public communication is managed, and what forms of pressure participants experience. The study uses an exploratory qualitative case-study design. Its materials



RELECTIO

Journal of Critical Governance and Legal Reform

Vol. 1, No. 1, 2026, 35-47

ISSN: XXXX-XXXX (Print) | ISSN: XXXX-XXXX (Electronic)

Open Access: <https://journal.binaba.id/index.php/jhb/index>

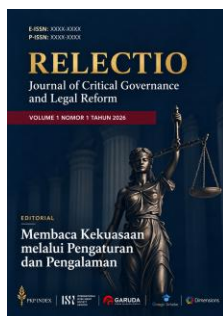
include an interview with a protest organizer, three digital illustrations, and news reports used to contextualize events. The findings show that initiatives emerging from multiple groups still depend on intermediaries who maintain communication and align the implementation of collective action. Organizers also manage public messaging by delaying responses, using alternative channels, and simplifying political language. At the same time, the digital illustrations reveal competing frames that cast students as objects of criticism, security actors as guardians of public order, and the movement as a source of counterclaims. The informant reported disruptions to accounts and described a participant who withdrew after facing pressure through family relations. These accounts indicate that effective coordination and communication do not explain what support participants receive when they face pressure. The article identifies an analytical limit of rhizomatic organizing: the concept helps explain distributed initiatives and intermediary work, but does not by itself account for protection at the individual level. The findings are limited by reliance on one informant and a small set of digital materials. Further research should examine the direct experiences of participants facing pressure and the forms of support provided by their organizations.

Keywords: *rhizomatic organizing; student movements; protection of protest participants; digital communication; vulnerability.*

Pendahuluan

Pengorganisasian rimpang mengandung dilema bagi aktivisme gerakan di era digital: hubungan yang memungkinkan perlawanan berkembang melalui banyak titik sekaligus membuka kemungkinan keterpaparan orang-orang yang menggerakkannya. Keluwesan jejaring memperluas ruang inisiatif dan memungkinkan koordinasi berlangsung melampaui struktur organisasi formal, sementara komunikasi digital menyediakan jejak yang dapat digunakan untuk mengawasi serta meningkatkan biaya keterlibatan politik (Bennett & Segerberg, 2012; Earl et al., 2022; Sastramidjaja, 2023). Dilema ini penting bagi perdebatan demokratisasi karena perluasan sarana partisipasi berlangsung bersama berkembangnya cara untuk membatasi penggunaannya. Dalam konteks Indonesia, hubungan tersebut menempatkan perlindungan peserta aksi sebagai persoalan mengenai kondisi yang memungkinkan kritik dan tindakan kolektif tetap dijalankan. Secara akademik, keadaan ini menuntut pembedaan antara kemampuan jejaring mempertahankan aktivitas dan kemampuan peserta mempertahankan keterlibatan di tengah tekanan (Peña et al., 2023; Tufekci, 2017). Kajian atas batas pengorganisasian rimpang menjadi penting untuk menjelaskan sejauh mana keluwesan yang menopang gerakan juga menyediakan perlindungan bagi orang-orang di dalamnya.

Dalam artikel ini, “peserta aksi” merujuk pada orang yang terlibat dalam pengorganisasian atau pelaksanaan aksi pada kasus yang ditelaah; selanjutnya, istilah ini dapat disingkat menjadi “peserta” untuk menghindari pengulangan. Istilah “aktivis” digunakan ketika membahas kategori umum dalam literatur mengenai aktivisme dan perlindungan, sedangkan “pengorganisasi” merujuk secara khusus pada informan yang menjalankan koordinasi aksi dan komunikasi antarkelompok. Pembedaan ini menjaga agar



RELECTIO

Journal of Critical Governance and Legal Reform

Vol. 1, No. 1, 2026, 35-47

ISSN: XXXX-XXXX (Print) | ISSN: XXXX-XXXX (Electronic)

Open Access: <https://journal.binaba.id/index.php/jhb/index>

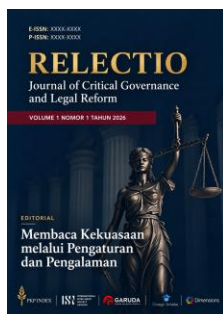
kategori teoretis tidak otomatis dilekatkan kepada setiap orang yang muncul dalam bahan empiris.

Dalam kajian gerakan sosial, pengorganisasian rimpang merujuk pada hubungan yang tumbuh melalui beberapa titik inisiatif dan memungkinkan kelompok mempertahankan keterhubungan tanpa bergantung sepenuhnya pada satu pusat komando. Sastramidjaja (2023) menggunakan perspektif ini untuk memahami gerakan pemuda di Indonesia, Thailand, dan Myanmar yang menghubungkan ruang digital dengan kegiatan di tingkat akar rumput. Pembacaan tersebut memperlihatkan arti penting keluwesan organisasi bagi penyesuaian gerakan terhadap tekanan. Namun, hubungan yang tersebar tetap ditopang oleh pekerjaan koordinasi. Gerbaudo (2017) menunjukkan bahwa pengelola media sosial dapat menjalankan kepemimpinan informal melalui pengaturan komunikasi, meskipun gerakan menjunjung keterbukaan dan horizontalitas. Kedua kajian ini mengarahkan perhatian pada perbedaan antara tersebarnya inisiatif dan pembagian pengaruh dalam kerja sehari-hari gerakan.

Pembedaan tersebut menjadi lebih penting ketika tekanan terhadap aktivisme menjangkau hubungan sosial peserta. Deng dan O'Brien (2013) memperlihatkan bagaimana otoritas di Tiongkok menggunakan kedekatan keluarga dan hubungan personal untuk mendorong penghentian keterlibatan dalam protes. Dalam konteks yang berbeda, Peña et al. (2023) menunjukkan bahwa tekanan berkepanjangan terhadap aktivis di Kolombia, Kenya, dan Indonesia dapat menghasilkan kelelahan emosional yang mengurangi kemampuan mempertahankan aktivitas. Literatur ini memperluas pemahaman tentang kerentanan: risiko keterlibatan berlangsung melalui hubungan antara kegiatan politik dan kehidupan sehari-hari, dengan konsekuensi yang dapat berbeda bagi setiap peserta. Karena itu, perpindahan kanal komunikasi maupun penyebaran tugas perlu dibaca bersama kondisi sosial orang-orang yang menjalankannya.

Pertemuan kedua rumpun kajian tersebut menyediakan ruang untuk menelaah hubungan antara keluwesan organisasi dan perlindungan peserta aksi secara lebih spesifik. Literatur gerakan berjejaring menjelaskan kemampuan menghubungkan kelompok beserta keterbatasan kapasitas organisasinya, sedangkan kajian represi menguraikan bagaimana tekanan memengaruhi keberlanjutan keterlibatan politik (Earl et al., 2022; Sastramidjaja, 2023; Tufekci, 2017). Artikel ini memusatkan perhatian pada hubungan di antara keduanya: sejauh mana pembagian koordinasi disertai kemampuan menghadapi risiko yang ditanggung peserta. Perlindungan dipahami sebagai upaya mengurangi keterpaparan identitas dan mendukung peserta ketika menghadapi tekanan terkait aktivitasnya. Pembedaan ini memungkinkan keberlangsungan kegiatan kolektif diperiksa bersama pengalaman individual, sehingga kelanjutan gerakan tidak serta-merta menjadi ukuran kecukupan perlindungan.

Persoalan tersebut ditelaah melalui pengalaman pengorganisasian mahasiswa di Yogyakarta, dengan perhatian pada keterlibatan mahasiswa Universitas Gadjah Mada pada paruh pertama 2026. Bahan penelitian memuat keterangan mengenai agenda yang berasal dari beberapa kelompok, pembagian keputusan lapangan, serta pekerjaan penghubung dan



RELECTIO

Journal of Critical Governance and Legal Reform

Vol. 1, No. 1, 2026, 35-47

ISSN: XXXX-XXXX (Print) | ISSN: XXXX-XXXX (Electronic)

Open Access: <https://journal.binaba.id/index.php/jhb/index>

pengelola komunikasi. Penggunaan saluran alternatif dan penyesuaian penyampaian pesan menunjukkan upaya menjaga komunikasi gerakan dalam menghadapi tekanan. Pada saat yang sama, informan melaporkan gangguan akun serta pengalaman seorang peserta yang menarik diri setelah mengalami tekanan melalui keluarga. Keterangan tersebut menyediakan titik masuk untuk memeriksa hubungan antara praktik koordinasi dan kerentanan, dengan tetap membedakan pengalaman langsung informan dari laporan mengenai pihak lain. Yogyakarta dalam penelitian ini menjadi konteks untuk menelaah hubungan tersebut melalui pengalaman pengorganisasian tertentu, dengan cakupan kesimpulan yang mengikuti bahan penelitian.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini berupaya mengkaji bagaimana pengorganisasian rimpang dijalankan melalui koordinasi dan komunikasi gerakan mahasiswa di Yogyakarta, serta batas perlindungan peserta aksi yang tampak dalam pengalaman tersebut. Melalui studi kasus kualitatif eksploratif, artikel ini menelaah pembagian peran dan penyesuaian komunikasi dalam hubungannya dengan tekanan yang dilaporkan. Argumen yang dikembangkan menempatkan kapasitas koordinasi dan kapasitas perlindungan sebagai dua dimensi yang saling berhubungan, tetapi memerlukan dasar penilaian tersendiri. Kontribusi artikel terletak pada pembacaan batas pengorganisasian rimpang dari sudut pengalaman peserta, sehingga kemampuan jejaring mempertahankan kegiatan diperiksa bersama kondisi yang memungkinkan seseorang tetap terlibat. Dalam kajian tata kelola gerakan, pembacaan ini memperjelas pentingnya menghubungkan pembagian kewenangan dengan tanggung jawab perlindungan.

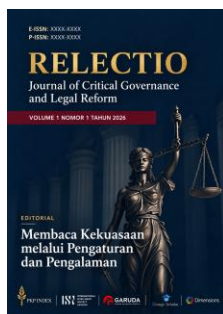
Kajian Pustaka

Logika Rimpang dalam Pengorganisasian Gerakan

Pengorganisasian rimpang menggambarkan hubungan antarkelompok yang berkembang melalui beberapa titik inisiatif dan memungkinkan penyambungan kembali ketika suatu hubungan terputus. Konsep ini berangkat dari pemikiran Deleuze dan Guattari (1980/1987), kemudian digunakan Sastramidjaja (2023) untuk membaca keluwasan gerakan pemuda Asia Tenggara dalam menghubungkan ruang digital dengan kegiatan di akar rumput. Dalam pengertian tersebut, kekuatan rimpang terletak pada kemungkinan memperluas hubungan dan menyesuaikan tindakan tanpa bergantung sepenuhnya pada satu pusat komando.

Hubungan yang tersebar tetap membutuhkan pekerjaan koordinasi. Aksi konektif menjelaskan bagaimana peredaran pesan digital membantu mengorganisasikan keterlibatan, sedangkan kajian kepemimpinan informal memperlihatkan pengaruh pengelola kanal dalam menentukan arah komunikasi (Bennett & Segerberg, 2012; Gerbaudo, 2017). Karena itu, keterbukaan inisiatif perlu dibedakan dari pembagian kewenangan: banyak kelompok dapat terlibat, sementara keputusan tertentu tetap bergantung pada penghubung atau pengelola komunikasi. Artikel ini membaca pengorganisasian rimpang melalui asal inisiatif, ruang keputusan kelompok, dan pekerjaan yang mempertahankan hubungan di antaranya.

Kerentanan Aktivis dalam Relasi Digital dan Sosial



RELECTIO

Journal of Critical Governance and Legal Reform

Vol. 1, No. 1, 2026, 35-47

ISSN: XXXX-XXXX (Print) | ISSN: XXXX-XXXX (Electronic)

Open Access: <https://journal.binaba.id/index.php/jhb/index>

Kerentanan aktivis merujuk pada kondisi yang membuat peserta terpapar tekanan dan mengalami hambatan untuk mempertahankan keterlibatan. Dalam ruang digital, tekanan dapat berlangsung melalui pengawasan atau gangguan terhadap sarana komunikasi. Dalam hubungan sosial, kedekatan keluarga dan pertemanan dapat menjadi jalur untuk memengaruhi keputusan peserta agar meninggalkan kegiatan politik (Deng & O'Brien, 2013; Earl et al., 2022). Kedua jalur tersebut menunjukkan bahwa risiko aktivisme menjangkau kehidupan peserta melampaui ruang aksi. Namun, keterkaitan antara gangguan digital dan tekanan melalui keluarga tetap memerlukan bukti pada setiap kasus.

Tekanan yang berlangsung terus-menerus juga dapat mengurangi kemampuan seseorang untuk tetap aktif. Peña et al. (2023) menyebut proses ini sebagai pengikisan emosional, yakni akumulasi pengalaman menekan yang dapat menghasilkan kelelahan dan pelepasan keterlibatan. Sementara itu, kajian perlindungan aktivis menekankan perlunya memahami risiko sesuai keadaan orang yang menghadapinya (Nah et al., 2013). Berdasarkan perhatian tersebut, penggunaan kanal alternatif atau penyamaran identitas dipahami sebagai upaya mengelola keterpaparan; manfaat perlindungannya perlu diperiksa melalui pengalaman peserta.

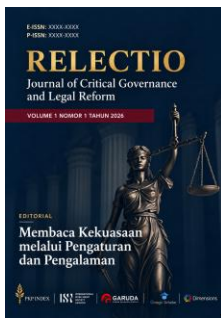
Batas Perlindungan dalam Keberlanjutan Gerakan

Perlindungan aktivis mencakup upaya mengurangi risiko dan menyediakan dukungan ketika peserta menghadapi tekanan. Penilaiannya memerlukan perhatian terhadap mekanisme bantuan sekaligus kondisi yang memungkinkan aktivitas tetap dijalankan (Nah et al., 2013). Hal ini berbeda dari kapasitas koordinasi, yang berkaitan dengan kemampuan menghubungkan kelompok dan mempertahankan kerja bersama. Kajian protes berjejaring memperlihatkan pentingnya memeriksa kapasitas organisasi di balik mobilisasi, sementara kajian pengalaman aktivis menunjukkan hambatan yang dapat mengikis keterlibatan individual (Peña et al., 2023; Tufekci, 2017). Dengan demikian, kelanjutan kegiatan kolektif belum cukup untuk menjelaskan kondisi perlindungan pesertanya.

Artikel ini menggunakan pembedaan tersebut untuk menelaah batas pengorganisasian rimpang. Analisis menghubungkan pembagian peran dan pengelolaan komunikasi dengan pengalaman tekanan serta dukungan yang dilaporkan. Fokusnya adalah sejauh mana keluwesan yang menopang koordinasi disertai praktik perlindungan bagi peserta. Dalam perspektif tata kelola gerakan, hubungan ini mempertemukan kewenangan menentukan tindakan dengan tanggung jawab terhadap orang yang menanggung konsekuensinya. Kerangka tersebut memungkinkan kemampuan gerakan untuk terus berkembang dibaca bersama kerentanan aktivis di dalamnya.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan studi kasus kualitatif eksploratif untuk menelaah pengorganisasian rimpang dan batas perlindungan peserta aksi dalam gerakan mahasiswa di Yogyakarta, dengan perhatian pada keterlibatan mahasiswa Universitas Gadjah Mada pada paruh pertama 2026. Sumber utama berupa wawancara dengan seorang pengorganisasi yang dipilih secara purposif berdasarkan keterlibatannya dalam koordinasi aksi dan komunikasi



RELECTIO

Journal of Critical Governance and Legal Reform

Vol. 1, No. 1, 2026, 35-47

ISSN: XXXX-XXXX (Print) | ISSN: XXXX-XXXX (Electronic)

Open Access: <https://journal.binaba.id/index.php/jhb/index>

antarkelompok. Keterangan wawancara dibaca bersama tiga ilustrasi digital yang memuat pelabelan terhadap mahasiswa, representasi ketertiban oleh akun beridentitas kepolisian, dan tanggapan gerakan. Pemberitaan digunakan untuk memberikan konteks peristiwa. Karena informasi waktu dan asal sebagian materi terbatas, ilustrasi digital digunakan untuk membaca pembingkai pesan, bukan merekonstruksi satu rangkaian kejadian.

Analisis dilakukan dengan mengelompokkan bahan menurut pembagian kewenangan, pengelolaan komunikasi, serta pengalaman tekanan dan upaya perlindungan. Keterangan informan diperbandingkan dengan materi digital untuk menilai kesesuaian dan batas dukungan antarsumber. Analisis membedakan pengalaman langsung informan dari laporan mengenai orang lain, serta tujuan suatu taktik dari hasil yang dapat ditunjukkan. Dalam penyajian hasil, nama informan diganti dengan kode K1 melalui pseudonimisasi, sedangkan rincian pengenalan yang tidak diperlukan bagi analisis tidak dicantumkan. Langkah ini bertujuan mengurangi risiko pengenalan kembali dengan mempertahankan substansi keterangan, tanpa menjanjikan anonimitas penuh (Kaiser, 2009; Saunders et al., 2015). Kesimpulan dibatasi pada pengalaman pengorganisasian yang tersedia; bahan penelitian belum memadai untuk menilai keseluruhan jejaring, memastikan pelaku gangguan, atau menentukan efektivitas perlindungan.

Hasil dan Pembahasan

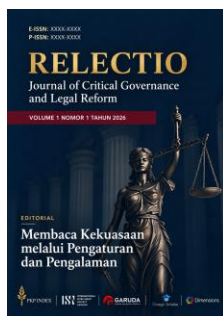
Hasil

Fleksibilitas Gerakan melalui Kerja Penghubung

Fleksibilitas gerakan dalam pengalaman K1 berlangsung melalui keterbukaan terhadap inisiatif dan pekerjaan mempertemukan kelompok. Usulan aksi dapat berasal dari lingkungan kampus maupun jejaring di luarnya. Ketika usulan datang dari luar, forum mahasiswa menjadi tempat mempertimbangkan keterlibatan; ketika gagasan berkembang dari dalam, pengorganisasi menghubungkannya dengan kelompok lain. Pergerakan agenda melalui kedua jalur tersebut menunjukkan bahwa pembentukan tindakan bersama melibatkan pertukaran usulan sekaligus pertimbangan organisasi.

Penghubung menjalankan pekerjaan yang mempertemukan proses tersebut dengan koordinasi pelaksanaan. K1 menjelaskan bahwa penghubung pada tingkat universitas menjaga komunikasi antarkelompok, sedangkan koordinator fakultas mengambil bagian dalam keputusan dan pengendalian peserta aksi di lapangan. Susunan ini memperlihatkan pembagian pekerjaan antara pemeliharaan hubungan lintas kelompok dan pengaturan tindakan pada tingkat peserta aksi. Ruang keputusan kelompok berjalan bersama kebutuhan untuk menyelaraskan pelaksanaan.

Berdasarkan penuturan K1, keterhubungan merupakan proses aktif yang harus terus diupayakan. Usulan perlu dibahas dan komunikasi perlu dijaga agar kelompok dapat menyesuaikan tindakan satu sama lain. Fleksibilitas dengan demikian memperoleh bentuk melalui pembagian peran yang memungkinkan gagasan bergerak melampaui kelompok asalnya. Keberadaan penghubung membantu menjelaskan bagaimana inisiatif dari beberapa arah dapat menjadi bagian dari kegiatan bersama.



RELECTIO

Journal of Critical Governance and Legal Reform

Vol. 1, No. 1, 2026, 35-47

ISSN: XXXX-XXXX (Print) | ISSN: XXXX-XXXX (Electronic)

Open Access: <https://journal.binaba.id/index.php/jhb/index>

Keterangan ini memberikan dasar untuk membaca koordinasi yang terdistribusi pada tingkat pengajuan agenda dan pelaksanaan. Kesetaraan pengaruh dalam penentuan keputusan akhir merupakan persoalan berbeda yang belum menjelaskan melalui pembagian tugas tersebut. Demikian pula, bahan penelitian belum merekam bagaimana fungsi penghubung digantikan ketika komunikasi terganggu.

Pengaturan Pesan dalam Perebutan Makna Aksi

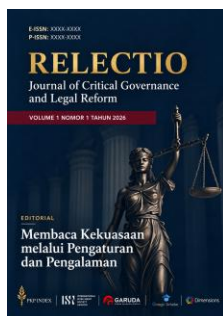
Komunikasi gerakan berlangsung dalam persaingan penafsiran mengenai tindakan mahasiswa. Ilustrasi D1 memperlihatkan komentar yang menilai perilaku mahasiswa dan kemampuan menyampaikan argumentasi. D2 menampilkan akun berlabel Polda D.I. Yogyakarta yang menempatkan aparat sebagai pengupaya dialog santun dan peserta sebagai pelaku kerusakan. D3 memuat tanggapan yang mempertentangkan penjelasan kepolisian dengan klaim gerakan mengenai kejadian di lapangan. Ketiganya memperlihatkan bahwa pemaknaan aksi melibatkan penilaian terhadap pelaku sekaligus penetapan versi peristiwa yang dianggap dapat dipercaya.

Tabel 1. Pembingkaian Aksi Mahasiswa dalam Materi Digital

Materi	Unsur yang ditampilkan	Pembingkaian Aksi	Posisi Epistemik
D1	Video dan komentar mengenai tindakan mahasiswa dalam suatu pertemuan.	Perhatian diarahkan pada perilaku mahasiswa dan kelayakan argumentasinya.	Contoh pelabelan negatif.
D2	Unggahan akun berlabel Polda D.I. Yogyakarta yang mencantumkan tanggal 24 Februari 2026.	Aparat ditampilkan sebagai pengupaya dialog dan ketertiban, sementara peserta disebut sebagai pelaku pelanggaran.	Representasi simbolik dalam unggahan.
D3	Komposit materi tanggapan dan pesan gerakan, dengan identitas lembaga mahasiswa pada sebagian materi.	Penjelasan kepolisian dipertentangkan dengan klaim gerakan mengenai kejadian di lapangan.	Contoh penafsiran tandingan.

Sumber: Pembacaan atas tiga ilustrasi digital dalam bahan penelitian. Catatan: Ketiganya digunakan untuk membandingkan pembingkaian, bukan merekonstruksi satu urutan kejadian.

Perbedaan dalam Tabel 1 menempatkan penyusunan tanggapan sebagai bagian dari pekerjaan pengorganisasian. K1 menjelaskan pilihan mengambil jeda sebelum merespons tuduhan terhadap gerakan. Jeda digunakan untuk membahas materi dan mengatur



RELECTIO

Journal of Critical Governance and Legal Reform

Vol. 1, No. 1, 2026, 35-47

ISSN: XXXX-XXXX (Print) | ISSN: XXXX-XXXX (Electronic)

Open Access: <https://journal.binaba.id/index.php/jhb/index>

penyampiannya. Dalam penalaran pengorganisasi, waktu respons merupakan bagian dari pertimbangan mengenai bagaimana posisi gerakan akan disampaikan kepada pembaca.

Pengaturan pesan juga mencakup penggunaan saluran alternatif agar distribusinya tidak seluruhnya bergantung pada kanal kelembagaan yang sama. K1 menyebut penggunaan *menfess* dan fitur berbagi cerita, disertai penyederhanaan bahasa politik untuk menjangkau pembaca di luar lingkaran organisasi. Pilihan medium dan bahasa memperlihatkan perhatian pada hubungan antara isi pesan dan khalayak yang dituju. Data tersebut menjelaskan tujuan komunikasi, sedangkan perubahan pemahaman atau dukungan pembaca belum dapat dinilai.

Identitas lembaga mahasiswa yang masih muncul pada sebagian materi D3 menunjukkan bahwa penggunaan saluran alternatif dapat berlangsung bersama keterlihatan organisasi. Identitas kelembagaan dan identitas personal pengelola merupakan dua lapisan informasi yang berbeda. Karena itu, keberadaan pesan gerakan di ruang publik belum menjelaskan sejauh mana orang yang menyusun atau mengedarkannya dapat dikenali.

Kerentanan yang Menjangkau Kehidupan Peserta Aksi

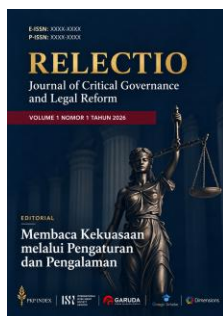
Pengalaman tekanan yang dilaporkan K1 menyangkut sarana komunikasi dan hubungan personal peserta. Gangguan terhadap akun pribadi maupun kelembagaan menempatkan keamanan komunikasi sebagai persoalan dalam pengorganisasian. Namun, laporan tersebut belum disertai rincian teknis yang memungkinkan penentuan jenis gangguan dan pelakunya.

Keterangan lain menyangkut seorang peserta yang menarik diri setelah mengalami tekanan melalui keluarganya. Cerita ini merupakan laporan K1 mengenai pengalaman orang lain. Dalam penuturan tersebut, keputusan menghentikan keterlibatan berkaitan dengan keadaan yang menjangkau hubungan keluarga, sehingga keberlanjutan partisipasi dipengaruhi oleh pertimbangan di luar forum gerakan.

Perbedaan kedua pengalaman tersebut memperjelas jangkauan persoalan perlindungan. Gangguan akun menyangkut sarana menjalankan komunikasi, sedangkan tekanan melalui keluarga menyangkut kondisi seseorang untuk tetap terlibat. Keterangan tentang kanal alternatif memperlihatkan cara pengorganisasi menyesuaikan komunikasi. Dukungan yang diterima peserta ketika menghadapi tekanan melalui keluarga belum diuraikan dalam bahan penelitian. Kedudukan setiap temuan dirangkum dalam Tabel 2.

Tabel 2. Praktik Pengorganisasian dan Jangkauan Penjelasan Perlindungan

Dimensi	Dasar empiris	Makna temuan	Batas penilaian
Hubungan antarkelompok	K1 menjelaskan beberapa asal inisiatif dan pembagian peran penghubung serta koordinator.	Fleksibilitas tindakan ditopang oleh pekerjaan menyelaraskan kelompok.	Kesetaraan pengaruh dan penggantian fungsi setelah gangguan belum terdokumentasi.



RELECTIO

Journal of Critical Governance and Legal Reform

Vol. 1, No. 1, 2026, 35-47

ISSN: XXXX-XXXX (Print) | ISSN: XXXX-XXXX (Electronic)

Open Access: <https://journal.binaba.id/index.php/jhb/index>

Pengelolaan komunikasi	K1 menjelaskan jeda respons, kanal alternatif, dan penyederhanaan bahasa.	Penyampaian posisi gerakan melibatkan pertimbangan organisasi.	Dampak terhadap penerimaan pesan dan keamanan identitas belum dapat ditentukan.
Pembimbingan aksi	D1-D3 menampilkan penilaian dan klaim yang berbeda.	Makna aksi diperebutkan melalui representasi pelaku dan peristiwa.	Materi belum membuktikan perubahan sikap publik atau satu rangkaian interaksi.
Tekanan terhadap peserta	K1 melaporkan gangguan akun dan penarikan diri seorang peserta setelah tekanan melalui keluarga.	Kerentanan yang dilaporkan menjangkau komunikasi dan kehidupan personal.	Pelaku, jalur tekanan, serta dukungan yang diterima peserta belum terkonfirmasi.

Sumber: Sintesis keterangan K1 dan pembacaan ilustrasi digital. **Catatan:** Tekanan melalui keluarga merupakan laporan informan mengenai pihak lain. Ketiadaan keterangan tentang bantuan tidak diperlakukan sebagai bukti bahwa bantuan tidak diberikan.

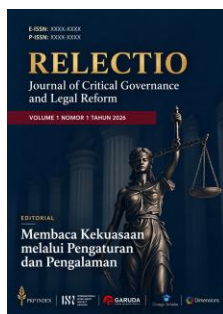
Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pekerjaan mempertahankan hubungan gerakan dan pengalaman menghadapi tekanan muncul sebagai persoalan yang berbeda dalam keterangan pengorganisasi. Pembagian tugas serta penyesuaian komunikasi memberikan gambaran mengenai cara kegiatan diorganisasikan. Penilaian terhadap perlindungan membutuhkan pengetahuan tambahan mengenai kondisi peserta dan respons terhadap tekanan yang dialaminya.

Pembahasan

Kerja Penghubung sebagai Dasar Fleksibilitas Rimpang

Temuan mengenai beberapa jalur inisiatif mengarahkan pembacaan rimpang pada proses pembentukan hubungan. Dalam pengalaman K1, gagasan dapat bergerak dari dalam maupun luar kampus, kemudian dipertemukan melalui forum dan pekerjaan penghubung. Fleksibilitas gerakan terbentuk melalui kemampuan mengolah usulan dan menyelaraskan keterlibatan kelompok. Pembacaan ini memperinci perhatian Sastramidjaja (2023) terhadap keluwesan gerakan pemuda dengan menunjukkan pekerjaan koordinasi yang menopang hubungan tersebut pada lingkup pengorganisasian mahasiswa.

Kedudukan penghubung juga memperjelas hubungan antara distribusi tindakan dan pembagian kewenangan. Literatur aksi konektif menunjukkan bahwa komunikasi berjejaring dapat berjalan bersama peran organisasi formal, sedangkan kajian kepemimpinan informal memperlihatkan kemampuan pengelola komunikasi untuk mengarahkan tindakan kolektif (Bennett & Segerberg, 2012; Gerbaudo, 2017). Temuan penelitian ini menempatkan kedua



RELECTIO

Journal of Critical Governance and Legal Reform

Vol. 1, No. 1, 2026, 35-47

ISSN: XXXX-XXXX (Print) | ISSN: XXXX-XXXX (Electronic)

Open Access: <https://journal.binaba.id/index.php/jhb/index>

perhatian tersebut dalam hubungan yang konkret: inisiatif memiliki beberapa jalur masuk, sementara penyelesaiannya melibatkan fungsi tertentu. Karena itu, pembagian kewenangan perlu diperiksa menurut jenis keputusan, bukan disimpulkan dari banyaknya kelompok atau kanal yang terlibat.

Dari sudut ini, kerja penghubung menjadi dasar untuk memahami bagaimana fleksibilitas dihasilkan. Penjelasan tersebut belum menetapkan ketergantungan mutlak pada individu tertentu, tetapi menunjukkan bahwa hubungan yang tersebar tetap membutuhkan pemeliharaan. Persoalan ketahanan kemudian terletak pada kemampuan mempertahankan atau mengganti pekerjaan tersebut ketika terjadi gangguan. Sejalan dengan Tufekci (2017), kemampuan mobilisasi perlu dibaca bersama kapasitas organisasi yang menopangnya. Data kasus ini menjelaskan pembagian pekerjaan, sementara kemampuan pemulihannya masih menjadi pertanyaan terbuka

Dari Pengaturan Visibilitas menuju Persoalan Perlindungan

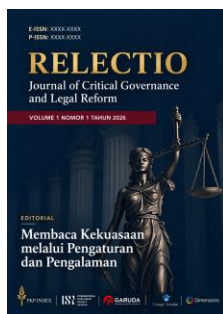
Penyesuaian komunikasi memperlihatkan upaya pengorganisasi mengatur kehadiran gerakan di ruang publik. Jeda respons memberikan waktu untuk menyusun posisi, kanal alternatif menyediakan pilihan distribusi, dan penyederhanaan bahasa menyesuaikan pesan dengan pembaca yang dituju. Ketiga praktik tersebut berhubungan melalui usaha mengelola cara gerakan dikenali dan ditafsirkan. Materi digital memperlihatkan relevansi pekerjaan ini karena tindakan mahasiswa hadir bersama penilaian yang dapat menggeser perhatian dari tuntutan menuju kelayakan perilaku peserta.

Namun, pengaturan representasi dan perlindungan identitas memiliki ukuran keberhasilan yang berbeda. Pesan dapat tersampaikan tanpa menjamin keamanan pihak yang mengelolanya. Sebaliknya, identitas personal dapat disamarkan sementara hubungan organisasi tetap terlihat. Literatur represi digital memperlihatkan bahwa informasi dan sarana komunikasi dapat digunakan untuk meningkatkan biaya aktivisme, sedangkan kajian perlindungan menekankan perlunya menilai risiko serta efektivitas respons secara kontekstual (Earl et al., 2022; Nah et al., 2013). Dengan demikian, kanal alternatif memberi bukti tentang penyesuaian komunikasi; manfaat perlindungannya bergantung pada informasi yang tetap dapat dihubungkan dengan peserta.

Laporan tekanan melalui keluarga memperlihatkan arti penting hubungan sosial dalam penilaian tersebut. Deng dan O'Brien (2013) menjelaskan bagaimana kedekatan personal dapat digunakan untuk memengaruhi keputusan peserta meninggalkan protes. Literatur ini menyediakan kemungkinan penjelasan bagi pengalaman yang dilaporkan K1, tanpa memastikan bahwa mekanisme yang sama berlangsung dalam kasus ini. Implikasinya ialah bahwa batas perlindungan tidak dapat ditentukan hanya dari cara identitas muncul di platform. Hubungan keluarga dan lingkungan sosial peserta juga perlu diperhitungkan ketika menelaah kondisi keterlibatan.

Keberlanjutan Kolektif dan Batas Perlindungan Individual

Persoalan utama yang muncul dari pertemuan temuan tersebut adalah perbedaan antara memelihara hubungan gerakan dan memelihara kondisi keterlibatan peserta.



RELECTIO

Journal of Critical Governance and Legal Reform

Vol. 1, No. 1, 2026, 35-47

ISSN: XXXX-XXXX (Print) | ISSN: XXXX-XXXX (Electronic)

Open Access: <https://journal.binaba.id/index.php/jhb/index>

Pembagian peran serta pengaturan pesan menjelaskan pekerjaan yang menopang kegiatan bersama. Laporan penarikan diri mengarahkan perhatian pada pengalaman yang dapat membatasi partisipasi seseorang. Kedua jenis keterangan tersebut perlu dibaca bersama agar penilaian mengenai gerakan tidak berhenti pada aktivitas yang tampak berlangsung.

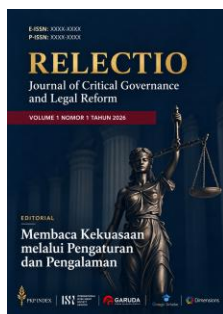
Perbedaan tingkat analisis ini mempertemukan kajian kapasitas protes dengan kajian pengalaman aktivis. Tufekci (2017) menelaah kapasitas organisasi di balik mobilisasi, sementara Peña et al. (2023) menunjukkan bagaimana tekanan berkepanjangan dapat mengikis kemampuan seseorang mempertahankan aktivismenya. Dalam kasus ini, laporan penarikan diri belum menyediakan dasar untuk menyimpulkan pengikisan emosional. Namun, laporan tersebut cukup untuk menegaskan bahwa keberlanjutan keterlibatan individual merupakan persoalan yang perlu diperiksa tersendiri dari pengelolaan kegiatan kolektif.

Oleh karena itu, keterbatasan konsep pengorganisasian rimpang terletak pada ketidakmampuannya menjelaskan mekanisme perlindungan peserta aksi secara personal. Keluwesan hubungan membantu menjelaskan bagaimana inisiatif dan komunikasi dipertahankan, sedangkan perlindungan membutuhkan keterangan mengenai dukungan yang diterima peserta ketika menghadapi tekanan. Dalam perspektif tata kelola gerakan, hubungan ini menempatkan pembagian kewenangan berdekatan dengan tanggung jawab terhadap konsekuensi keterlibatan. Keduanya perlu diperiksa secara empiris karena kemampuan mengoordinasikan tindakan belum dengan sendirinya menunjukkan kemampuan menangani risiko peserta.

Kontribusi penelitian ini terletak pada perbedaan tersebut. Pengorganisasian rimpang dinilai melalui hubungan antara kerja kolektif dan kondisi orang-orang yang menjalankannya. Cakupan satu informan serta kedudukan ilustratif materi digital membatasi kesimpulan pada pengalaman pengorganisasian yang tersedia. Karena itu, penelitian ini belum menetapkan kegagalan perlindungan, tetapi menunjukkan mengapa keberadaan koordinasi dan penyesuaian komunikasi belum mencukupi sebagai bukti perlindungan. Pengalaman langsung peserta yang menghadapi tekanan dan dokumentasi respons organisasi diperlukan untuk menjelaskan hubungan keduanya lebih jauh.

Kesimpulan

Kajian ini menunjukkan bahwa fleksibilitas gerakan mahasiswa dalam kasus yang ditelaah ditopang oleh kerja penghubung, yaitu kegiatan mempertemukan inisiatif dan menjaga komunikasi antarkelompok agar tindakan bersama dapat dijalankan. Koordinasi ini menjadi dasar pengelolaan komunikasi publik untuk menyampaikan posisi gerakan di tengah tekanan melalui kanal alternatif. Akan tetapi, laporan penarikan diri aktivis setelah tekanan melalui keluarga memperlihatkan bahwa keterlibatan dalam gerakan juga menjangkau kehidupan personal. Temuan ini menunjukkan batas pengorganisasian rimpang dalam menjelaskan perlindungan aktivis: fleksibilitas hubungan menopang kelincahan gerakan, sementara peserta tetap dapat menghadapi tekanan yang menghambat keterlibatannya.



RELECTIO

Journal of Critical Governance and Legal Reform

Vol. 1, No. 1, 2026, 35-47

ISSN: XXXX-XXXX (Print) | ISSN: XXXX-XXXX (Electronic)

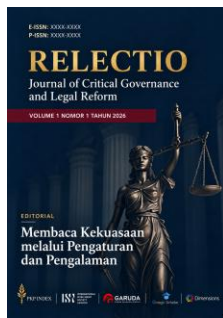
Open Access: <https://journal.binaba.id/index.php/jhb/index>

Hubungan tersebut memperlihatkan bahwa kemampuan gerakan mempertahankan koordinasi perlu dinilai bersama kemampuannya mendukung peserta yang menghadapi tekanan. Pembagian kewenangan memungkinkan tindakan berkembang dari beberapa kelompok, sedangkan perlindungan membutuhkan tanggung jawab yang dapat dijalankan ketika risiko muncul. Kontribusi kajian bagi tata kelola gerakan terletak pada hubungan antara kedua kebutuhan tersebut. Kajian ini mengajukan proposisi bahwa fleksibilitas pengorganisasian dapat menopang perlindungan apabila pekerjaan menjaga hubungan antarkelompok disertai mekanisme dukungan bagi peserta. Dengan demikian, keberlanjutan gerakan menyangkut kelangsungan kegiatan sekaligus kondisi yang memungkinkan aktivis tetap terlibat.

Kesimpulan ini terbatas pada keterangan seorang pengorganisasi dan tiga ilustrasi digital. Pengalaman tekanan melalui keluarga belum dikonfirmasi kepada peserta yang mengalaminya, sementara respons perlindungan organisasi belum terdokumentasi. Karena itu, kajian ini belum dapat menetapkan bahwa pengorganisasian rimpang menyebabkan kerentanan atau gagal memberikan perlindungan. Penelitian lanjutan perlu menelusuri pengalaman peserta yang terdampak dan respons organisasi terhadap tekanan untuk menguji bagaimana pembagian tanggung jawab memengaruhi dukungan yang diterima aktivis serta keberlanjutan keterlibatannya.

Daftar Pustaka

- Bennett, W. L., & Segerberg, A. (2012). The logic of connective action: Digital media and the personalization of contentious politics. *Information, Communication & Society*, 15(5), 739–768. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2012.670661>
- Deleuze, G., & Guattari, F. (1987). *A thousand plateaus: Capitalism and schizophrenia* (B. Massumi, Trans.). University of Minnesota Press. (Original work published 1980)
- Deng, Y., & O'Brien, K. J. (2013). Relational repression in China: Using social ties to demobilize protesters. *The China Quarterly*, 215, 533–552. <https://doi.org/10.1017/S0305741013000714>
- Earl, J., Maher, T. V., & Pan, J. (2022). The digital repression of social movements, protest, and activism: A synthetic review. *Science Advances*, 8(10), Article eabl8198. <https://doi.org/10.1126/sciadv.abl8198>
- Gerbaudo, P. (2017). Social media teams as digital vanguards: The question of leadership in the management of key Facebook and Twitter accounts of Occupy Wall Street, Indignados and UK Uncut. *Information, Communication & Society*, 20(2), 185–202. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2016.1161817>



RELECTIO

Journal of Critical Governance and Legal Reform

Vol. 1, No. 1, 2026, 35-47

ISSN: XXXX-XXXX (Print) | ISSN: XXXX-XXXX (Electronic)

Open Access: <https://journal.binaba.id/index.php/jhb/index>

- Kaiser, K. (2009). Protecting respondent confidentiality in qualitative research. *Qualitative Health Research*, 19(11), 1632–1641.
<https://doi.org/10.1177/1049732309350879>
- Nah, A. M., Bennett, K., Ingleton, D., & Savage, J. (2013). A research agenda for the protection of human rights defenders. *Journal of Human Rights Practice*, 5(3), 401–420. <https://doi.org/10.1093/jhuman/hut026>
- Peña, A. M., Meier, L., & Nah, A. M. (2023). Exhaustion, adversity, and repression: Emotional attrition in high-risk activism. *Perspectives on Politics*, 21(1), 27–42.
<https://doi.org/10.1017/S1537592721003273>
- Sastramidjaja, Y. (2023). *Rhizome vs regime: Southeast Asia's digitally mediated youth movements* (Trends in Southeast Asia, No. 6/2023). ISEAS–Yusof Ishak Institute.
https://www.iseas.edu.sg/wp-content/uploads/2023/02/TRS6_23.pdf
- Saunders, B., Kitzinger, J., & Kitzinger, C. (2015). Anonymising interview data: Challenges and compromise in practice. *Qualitative Research*, 15(5), 616–632.
<https://doi.org/10.1177/1468794114550439>
- Tufekci, Z. (2017). *Twitter and tear gas: The power and fragility of networked protest*. Yale University Press.